



PPAS 2023

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

PEMERINTAH KOTA PALU

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALU**

Nomor : 010/2515/BPKAD/2022
Nomor : 910/45/Persidangan
Tanggal : 13 Agustus 2022

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. HADIANTO RASYID, S.E.
Jabatan : WALI KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Balai Kota No. 1 Palu

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palu

2. a. Nama : ERMAN LAKUANA, S.Sos
Jabatan : Plt. KETUA DPRD KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

- b. Nama : RIZAL, S.Pd.I.,M.Pd
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintahan Daerah tentang Kebijakan Umum APBD T.A 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

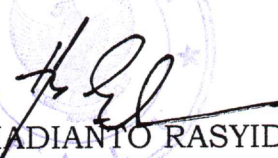
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Tanggal 13 Agustus 2022

WALI KOTA PALU

Selaku,

PIHAK PERTAMA




H. HADIANTO RASYID, S.E.

PIMPINAN DPRD KOTA PALU

Selaku,


PIHAK KEDUA



ERMAN LAKUANA, S.Sos

WAKIL KETUA DPRD

KOTA PALU,



RIZAL, S.PdI., M.Pd

DAFTAR ISI

Nota Kesepakatan	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	1
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	4
II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
2.1. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	8
III. PRIORITAS BELANJA DAERAH	
3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	10
3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Palu dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.....	23
3.3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	45
IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	86
4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	181
V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	
5.1. Rencana Pembiayaan Daerah	182
VI. PENUTUP	
6.1. Penutup	183

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	7
Tabel 3.1. Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah	20
Tabel 3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	24
Tabel 3.3. Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	41
Tabel 3.4. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2023, dan Prioritas RPJMD Kota Palu 2021-2026	44
Tabel 3.5. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	47
Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	75
Tabel 4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023	139
Tabel 5.1. Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	140

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan :

- Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2023 yang telah disesuaikan kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

Prioritas pembangunan Kota Palu untuk Tahun 2023 disusun dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan dalam klasifikasi belanja Perangkat Daerah (PD) maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan hibah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk masing-masing urusan baik menurut Perangkat Daerah (PD) maupun menurut prioritas program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat diperlukan kesepakatan antara Pemerintah Kota Palu dengan DPRD Kota Palu, untuk kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penahapan dari proses perencanaan pembangunan daerah yang sinergis diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, pembangunan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Penahapan dan proses ini dimaksudkan sebagai bagian untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam program sebagai instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta mendapat alokasi anggaran sebagai dukungan bagi pelaksanaan aktivitas, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penganggaran serta kapasitas keuangan daerah.

1. Meningkatkan konsistensi kebijakan yang dilakukan antar PD, baik kebijakan makro dan mikro, maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Keselarasan perencanaan program kegiatan dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

Prioritas dan alokasi perlu diperhatikan, dimana anggaran dengan sumber dana yang terbatas, diprioritaskan kepada program maupun kegiatan dan sub kegiatan yang lebih efektif dalam mencapai manfaat terbesar bagi sasaran pembangunan, PPAS merupakan pedoman bagi setiap PD, agar dalam penyusunan rencana kerja dan anggarannya, menggambarkan target pencapaian kinerja yang terukur sebagai bahan penyusunan RAPBD.

Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/4189/keuda, mengintruksikan setiap Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Sebagai bagian dari rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, PPAS Kota Palu Tahun Anggaran 2023 dilakukan penyesuaian dan disusun secara terpadu dan menyeluruh untuk setiap kelompok, jenis, obyek, serta rincian obyek belanja berdasarkan pada prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi, dengan memperhatikan azas kepatutan dan kelayakan.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sebagaimana disampaikan bahwa PPAS Kota Palu Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan daerah dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Kota Palu Tahun Anggaran 2023 yang bertujuan untuk mendistribusikan sumber

daya dan dana yang ada kepada program maupun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan, dan memiliki keterkaitan langsung antara kinerja kegiatan dengan alokasi anggaran.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan PPAS Kota Palu Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
 19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7).

II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan dalam PPAS Kota Palu pada tahun anggaran 2023 secara umum masih mengacu pada asumsi dasar dan angka-angka APBD Tahun Anggaran 2022, dimana angka penerimaan sudah termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus) baik fisik maupun non fisik yang klasifikasinya disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun
Anggaran 2023

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	265.330.322.568	
4.1.01.	Pajak Daerah	142.861.509.800	Perda No. 1 Tahun 2011, Perda No. 3 Tahun 2014, Perda No. 10 Tahun 2017
4.1.02.	Retribusi Daerah	30.526.052.268	Perda No. 7 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2011, Perda No. 9 Tahun 2011
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.500.000.000	
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	89.442.760.500	Perda No. 8 Tahun 2011
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	977.799.834.441	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	901.791.205.554	
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.008.628.887	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.441.400.000	
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.441.400.000	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.293.571.557.009	

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.767.604.000	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.767.604.000	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		39.767.604.000	
JUMLAH DANA TERSEDIA		1.333.339.161.009	

III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023, meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1. akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
2. peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
3. peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
4. peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
5. pengembangan industri pendukung EBT.

b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1. pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif);
2. pengelolaan hutan berkelanjutan;
3. penyediaan air untuk pertanian;
4. penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;

5. pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 6. pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 2. peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 3. peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 4. peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 5. peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 2. peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 3. peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 4. peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan

5. peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 2. peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 3. peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
 4. peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha; dan
 5. peningkatan nilai tambah usaha sosial.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
 2. peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 3. peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 4. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 5. perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 6. pengembangan industri halal.

- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 2. peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 3. pengelolaan impor;
 4. peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 5. peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 6. peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 2. optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
 3. peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 4. peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 5. peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
- b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.
- 1) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - 2) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

- 3) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - 4) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.
- 1) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) pengentasan kemiskinan; dan
 - 7) peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- 1) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - b) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - c) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - d) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) sistem jaminan sosial nasional;
 - b) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - c) perlindungan sosial adaptif; dan
 - d) kesejahteraan sosial.
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;

- b) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - c) peningkatan pengendalian penyakit;
 - d) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas);
dan
 - e) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat
dan makanan.
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas,
dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- a) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - b) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - c) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik
dan tenaga kependidikan;
 - d) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - e) peningkatan tata kelola pendidikan.
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda,
dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- a) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - b) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan
perlindungan perempuan;
 - c) kualitas pemuda.
- 6) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- a) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - b) keperantaraan usaha dan dampak sosial;
- 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan
kegiatan prioritas, yaitu:
- a) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama
industri;
 - b) peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi;
dan
 - c) prestasi olahraga.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - c) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - d) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - e) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - f) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
- 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;

- b) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - c) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - d) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - e) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- 3) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- a) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - b) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
 - c) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - d) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - e) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- a) peningkatan budaya literasi;
 - b) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - c) pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - d) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
- e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

- 1) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- 2) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- 3) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- 4) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- 5) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a. penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - b. penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - c. pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - d. keselamatan dan keamanan transportasi; dan
 - e. ketahanan kebencanaan infrastruktur;
- 2) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a. Konektivitas jalan; dan
 - b. Konektivitas darat.
- 3) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a. Transportasi perkotaan;
 - b. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan;
 - c. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; dan
 - d. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
- 4) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a. Penuntasan infrastruktur TIK;
 - b. Pemanfaatan infrastruktur TIK; dan
 - c. Fasilitas pendukung transformasi digital.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- 3) Pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - d) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Penanggulangan bencana; dan
 - b) Peningkatan ketahanan iklim
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) pembangunan energi berkelanjutan;
 - b) pemulihan lahan berkelanjutan;
 - c) pengelolaan limbah;
 - d) pengembangan industri hijau; dan
 - e) rendah karbon pesisir dan laut.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.
- 1) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - 2) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
 - 3) penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - 4) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan

- 5) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- 1) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - b) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - c) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- 2) Penegakan Hukum Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Penataan regulasi;
 - b) penguatan sistem anti korupsi; dan
 - c) peningkatan akses terhadap keadilan.
- 3) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - b) transformasi pelayanan publik;
 - c) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - d) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- 4) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) penguatan keamanan dalam negeri;
 - b) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - c) penguatan ketahanan dan keamanan siber.

Prioritas Nasional harus bersinergi dengan prioritas pembangunan di daerah agar tujuan secara nasional dapat tercapai. Program Pemerintah Kota Palu yang mendukung prioritas nasional dapat terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas
Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2021-2026
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya	Ekonomi Mantap Berdaya Saing
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Infrastruktur Mantap Berketahanan Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan	SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter Pemerintahan Mantap Melayani
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Pemerintahan Mantap Melayani SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Infrastruktur Mantap Berketahanan Ekonomi Mantap Berdaya Saing Lingkungan Mantap Berkelanjutan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Penanggulangan korban bencana	Lingkungan Mantap Berkelanjutan Infrastruktur Mantap Berketahanan

No	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2021-2026
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Pemerintahan Mantap Melayani Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dan RPJMD Kota Palu 2021-2026

3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Palu dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 disebutkan bahwa visi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Rangkaian kata-kata kunci dalam visi ini dapat dibentuk menjadi satu akronim Juri Teradil. Juri Teradil memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang memberi maslahat bagi masyarakat Sulawesi Tengah dibutuhkan tidak hanya sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana. Dengan demikian menunjukkan bahwa pembangunan di Sulawesi Tengah harus dituntun oleh kemampuan dan kejernihan hati nurani atau moralitas yang prima dari setiap individu dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan serangkaian misi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah;
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah, kelembagaan politik, sosial budaya, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Tahap Pertama dan Kedua, maka RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 mengusung Visi “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”. Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026,

dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital; dan
9. Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Sinkronisasi serta keterkaitan antar berbagai prioritas dan hierarki pembangunan diperlukan agar, arah penanganan dapat fokus pada hasil (*outcome*). Keterkaitan antara agenda RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kota Palu merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah sehingga prioritas pembangunan Kota Palu juga harus mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Sinkronisasi program Kota Palu terhadap prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dapat terlihat pada Tabel 3.2.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
75	Percepatan Penanganan COVID-19				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Kecamatan Palu Barat	193.489.000
76	Penunjang Program prioritas				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	300.635.464.100
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	82.985.882.560
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.248.434.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Kesehatan	62.354.159.256
				Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	110.612.359.607
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			AFP Rate per 100.000 penduduk		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Angka kelangsungan hidup bayi		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Penderita Diare yang ditangani		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Persentase pemenuhan SPM Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Persentase penanggulangan kejadian luar biasa		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Prevalensi balita Stunting		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk)		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114
			Usia Harapan Hidup		
				Dinas Kesehatan	37.635.776.114

				Dinas Kesehatan	16.849.981.504
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	149.389.000
			Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan		
				Dinas Kesehatan	149.389.000
			Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)		
				Dinas Kesehatan	149.389.000
			Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar		
				Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	103.090.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		
				Dinas Kesehatan	410.670.300
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		
				Dinas Kesehatan	2.739.127.050
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Pekerjaan Umum	299.617.900
				Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	6.117.340.248
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal		
				Dinas Pekerjaan Umum	31.513.639.463
			Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		
				Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	752.128.500
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase penataan bangunan dan lingkungannya		
				Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	351.887.400
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		
				Dinas Pekerjaan Umum	38.025.023.400
			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		
				Dinas Pekerjaan Umum	76.050.046.800
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Cakupan pengembangan jasa konstruksi		
				Dinas Pekerjaan Umum	81.599.230
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		
				Dinas Pekerjaan Umum	81.599.230
			Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		
				Dinas Pekerjaan Umum	81.599.230
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase ketaatan terhadap RTRW		
				Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.140.216.750
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.588.796.808
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	402.183.500
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.352.075.123

				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.749.344.000
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.289.452.500
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Cakupan Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	73.920.850.400
			Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36.960.425.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.776.332.688
				Satuan Polisi Pamong Praja	12.590.889.170
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.455.159.558
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	3.390.720.000
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	3.390.720.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.649.811.300
			Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.649.811.300
			Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.649.811.300
			Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.649.811.300

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.649.811.300
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		
				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.085.964.300
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.054.709.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Sosial	6.218.194.034
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
				Dinas Sosial	574.562.500
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
			Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		
				Dinas Sosial	28.000.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
				Dinas Sosial	1.841.572.908
			Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis		
				Dinas Sosial	1.841.572.908
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)		
				Dinas Sosial	14.768.525.400
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase capaian penanganan bencana		
				Dinas Sosial	296.905.700
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		
				Dinas Sosial	296.905.700
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase pemenuhan tenaga kerja bersertifikasi		
				Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	265.945.900
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota		
				Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	16.355.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		
				Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	247.059.100
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		
				Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	247.059.100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	971.026.918
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			indeks pembangunan gender (IPG)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51.416.780
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.000.900
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Rasio KDRT		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	168.355.180
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	138.453.800
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34.052.850
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			indeks kota layak anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.941.250
			Indeks Kota Layak Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	279.870.993
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Cakupan perlindungan khusus anak		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.787.150
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	738.947.010
			Persentase capaian peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	738.947.010
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase capaian penanganan kerawanan pangan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	249.647.084
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase capaian pengawasan keamanan pangan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	38.811.500
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		
				Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	21.300.000
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		
				Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	10.022.450
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Cakupan penatagunaan tanah		
				Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	394.196.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Lingkungan Hidup	11.341.781.423
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Cakupan perencanaan lingkungan hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	370.092.860
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	653.413.697
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		
				Dinas Lingkungan Hidup	3.305.018.800
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		
				Dinas Lingkungan Hidup	40.681.650
			Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
				Dinas Lingkungan Hidup	40.681.650
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat		
				Dinas Lingkungan Hidup	162.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase jumlah sampah yang tertangani		
				Dinas Lingkungan Hidup	13.932.936.680
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.427.786.676
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.077.449.910
			Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.077.449.910
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.823.500
			Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.823.500
			Cakupan Penerbitan Akta Perceraian		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.823.500
			Kepemilikan akta kelahiran		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.823.500
			Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.823.500
			Persentase pemenuhan kebutuhan pencatatan sipil masyarakat		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.823.500
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	121.520.010

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Cakupan pengelolaan profil kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.191.500
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Cakupan pengelolaan profil kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.800.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.940.558.173
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	73.057.500
			TFR (Angka Kelahiran Total)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	73.057.500
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.604.064.109
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.604.064.109
			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.604.064.109
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.471.817.050
			Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.471.817.050
			Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.471.817.050
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Perhubungan	10.952.211.321
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
				Dinas Perhubungan	5.282.948.882
			Persentase layanan angkutan darat		
				Dinas Perhubungan	5.282.948.882
			Rasio konektivitas kabupaten/kota		
				Dinas Perhubungan	5.282.948.882
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Komunikasi dan Informatika	4.817.529.752
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	215.059.800
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Cakupan pengelolaan aplikasi informatika		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	4.401.908.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	5.023.323.703
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase koperasi aktif		
				Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	116.042.150
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase koperasi sehat		
				Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	144.018.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
				Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	79.710.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Cakupan pengembangan UMKM		
				Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	66.674.228
			Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha		
				Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	66.674.228
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP DPMPTSP		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.201.001.788

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.480.800
				Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	2.446.210.590
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	332.465.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81.892.500
				Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	87.568.500
			Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)		
				Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	87.568.500
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	101.521.000
				Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	218.541.550
			Indeks Kepuasan Masyarakat (KEK)		
				Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	218.541.550
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	573.949.330
				Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	19.885.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95.742.500
				Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	90.728.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Pemuda dan Olahraga	3.987.060.738
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	6.743.733.214
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	441.659.125

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	140.974.850
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	140.974.850
			Persentase pemenuhan data statistik sektoral		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	140.974.850
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			

				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	786.453.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			

				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	28.830.610
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			

				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	180.692.500
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			

				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	32.980.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.183.731.561
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			

				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	121.089.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			

				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	26.898.115
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			

				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.675.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Produksi perikanan tangkap (ton)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.203.612.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Produksi perikanan budidaya (ton)		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	766.591.900
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	135.192.465
			Persentase capaian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	135.192.465
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Pariwisata	4.317.236.157
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata		
				Dinas Pariwisata	125.000.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Cakupan pemasaran pariwisata		
				Dinas Pariwisata	323.512.998
			Cakupan Pemasaran Pariwisata		
				Dinas Pariwisata	323.512.998
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif		
				Dinas Pariwisata	271.950.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.491.324.252
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.038.996.220
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.038.996.220
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	608.963.950
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	285.174.580
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	285.174.580
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.791.900
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Cakupan Bina Kelompok Tani (%)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	642.453.050
			Persentase capaian pelaksanaan penyuluhan pertanian		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	642.453.050
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.059.599.704
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	124.730.000
			Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	249.460.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.476.718.160
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	338.902.400
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	992.794.924
			Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	992.794.924
			Persentase penyelesaian sengketa konsumen		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	992.794.924
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Cakupan Bina IKM		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.756.897.051
			Cakupan perencanaan dan pembangunan industri		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.756.897.051
			Persentase IKM yang memiliki izin		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.756.897.051

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.756.897.051
			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.756.897.051
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	144.900.000
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	72.450.000
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	72.450.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	21.324.400
			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	21.324.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Sekretariat Daerah	25.726.248.506
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		
				Sekretariat Daerah	59.044.535.304
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan		
				Sekretariat Daerah	5.508.508.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Sekretariat DPRD	27.680.632.248
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat DPRD	15.434.605.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Perencanaan Pembangunan daerah	5.603.733.343
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan daerah	1.047.044.800

				Badan Perencanaan Pembangunan daerah	2.132.753.850
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.556.475.626
				Badan Pendapatan Daerah	14.883.587.154
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			

				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.053.802.100
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			

				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.770.235.650
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			

				Badan Pendapatan Daerah	2.152.883.450
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.238.908.915
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.571.386.000
			Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	818.813.050
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	818.813.050
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	818.813.050
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.571.386.000
			Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.571.386.000
			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.571.386.000
			Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	818.813.050

				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	529.172.200
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	516.953.700
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	516.953.700
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	516.953.700
			Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	516.953.700

				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.967.500.250
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.867.172.316
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti		
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	262.893.350
			Persentase hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti		
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	142.364.000
			Persentase implementasi inovasi daerah		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	185.005.300
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Inspektorat	8.707.811.608
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			

				Inspektorat	1.383.719.300
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			

				Inspektorat	99.858.150
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Kecamatan Palu Selatan	5.921.600
			Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan		
				Kecamatan Palu Selatan	300.714.350

				Kecamatan Palu Selatan	7.833.353.688
				Kecamatan Mantikulore	10.428.319.453
				Kecamatan Palu Barat	6.609.589.041
				Kecamatan Palu Timur	6.705.875.852
				Kecamatan Tatanga	7.575.563.161
				Kecamatan Tawaeli	6.371.328.324
				Kecamatan Ulujadi	6.239.924.108
				Kecamatan Palu Utara	5.763.201.762
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

				Kecamatan Palu Selatan	13.855.800
			indeks kepuasan masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Mantikulore	18.216.800
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Mantikulore	18.216.800

				Kecamatan Palu Barat	24.041.400
				Kecamatan Palu Timur	4.250.000
				Kecamatan Tatanga	17.791.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Tawaeli	20.756.900

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Ulujadi	17.111.800
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Palu Utara	9.181.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU SELATAN)		
				Kecamatan Palu Selatan	5.989.607.500
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan palu selatan		
				Kecamatan Palu Selatan	5.989.607.500
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kecamatan Mantikulore)		
				Kecamatan Mantikulore	7.919.568.172
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN MANTIKULORE)		
				Kecamatan Mantikulore	7.919.568.172
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU BARAT)		
				Kecamatan Palu Barat	5.213.125.050
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU BARAT)		
				Kecamatan Palu Barat	941.208.250
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU TIMUR)		
				Kecamatan Palu Timur	4.390.131.614
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU TIMUR)		
				Kecamatan Palu Timur	4.390.131.614
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN TATANGA)		
				Kecamatan Tatanga	1.108.884.550
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN TATANGA)		
				Kecamatan Tatanga	5.652.724.550
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN TAWAELI)		
				Kecamatan Tawaeli	5.467.908.092
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN TAWAELI)		
				Kecamatan Tawaeli	5.467.908.092
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN ULUJADI)		
				Kecamatan Ulujadi	6.516.533.304
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN ULUJADI)		
				Kecamatan Ulujadi	6.516.533.304
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU UTARA)		
				Kecamatan Palu Utara	583.694.500
			Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU UTARA)		
				Kecamatan Palu Utara	4.962.161.940
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6

				Kecamatan Palu Selatan	88.411.750
				Kecamatan Palu Barat	164.265.000
				Kecamatan Palu Timur	157.830.000
				Kecamatan Tatanga	146.145.000
				Kecamatan Tawaeli	128.065.000
				Kecamatan Ulujadi	157.315.000
			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Palu Utara)		
				Kecamatan Palu Utara	162.315.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.534.300.809
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.208.113.625
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.343.601.140
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase ormas yang ber-SKT dan Aktif		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.587.400
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.281.572.950
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase penurunan gangguan keamanan di Kota Palu		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	469.767.150

3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Pembangunan daerah Kota Palu yang mengacu pada visi dan misi pemerintahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, perlu di operasionalkan melalui menjabarkan prioritas pembangunan daerah pada tiap-tiap misi. Tujuan prioritas pembangunan adalah memberi arah dan fokus pembangunan Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Prioritas pembangunan diharapkan akan menjadi agenda utama pembangunan yang akan diimplementasikan dan terukur dalam upaya mewujudkan Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026 di atas, maka prioritas pembangunan Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Program Prioritas Pembangunan Kota Palu

Misi	Prioritas pembangunan
1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global	1. 4 Miliar untuk bedah rumah plus modal usaha perkelurahan; 2. Inkubator bisnis berbasis digital perkelurahan; 3. Penguatan UMKM; 4. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi; 5. Kawasan agrowisata Layana dan Petobo; 6. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi; 7. Wisata pasar ikan Kota Palu; 8. 1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu; 9. Kerjasama antar Pemerintah Daerah; 10. Forum komunitas kreatif Kota Palu.

Misi	Prioritas pembangunan
<p>2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangun Palu Tahan Gempa; 2. Pembangunan Gudang Logistik Bencana; 3. <i>Waterfront Park</i> Talise (Monumen Tsunami); 4. Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu; 5. Ruang terbuka hijau/<i>public area</i> per kecamatan; 6. Pembangunan gedung kesenian Kota Palu; 7. Palu Adipura; 8. Palu Terang; 9. Palu Hijau; 10. Palu Ramah Difabel; 11. CSR Forum; 12. Satgas Cepat Tanggap (<i>Quick Respons/ Command Center</i>); 13. Kelurahan mantap 2 miliar; 14. Revitalisasi perpustakaan Kota Palu; 15. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi.
<p>3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palu kota sehat; 2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern; 3. Satu ambulans satu kelurahan; 4. BPJS gratis warga tidak mampu; 5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka RT/RW, petugas Rumah Ibadah; 6. 1.000 beasiswa kuliah bagi keluarga tidak mampu se – Kota Palu; 7. Reward sebesar Rp. 2 miliar bagi SD dan SMP berprestasi; 8. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se – Kota Palu; 9. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi perkelurahan; 10. Update berkala kompetensi, dan kapasitas guru/pengajar; 11. Bus gratis untuk siswa sekolah; 12. Kepala sekolah magang; 13. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya; 14. Badan pelayanan rumah ibadah; 15. Palu berbagi; 16. Palu religi; 17. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni – budaya

Misi	Prioritas pembangunan
	18. Palu Ramah Difabel; 19. Event olahraga tahunan Kota Palu; 20. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu.
4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani	1. Pengelolaan APBD secara transparan dan akuntabel 2. <i>E – Government/Smart City</i> 3. QSL (<i>Quick Service License</i> = Pelayanan Perizinan Cepat) 4. <i>One touch</i> info Kota Palu 5. Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di semua Instansi 6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer 7. ASN magang nasional 8. Pelayanan pembuatan KTP, KK, dan Akte lahir di kantor kelurahan.

Sumber : RPJMD Kota Palu 2021-2026

Berdasarkan penetapan prioritas pembangunan pada tiap-tiap misi di atas, maka dapat disusun prioritas pembangunan Kota Palu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif;
- 2 Mewujudkan SDM unggul, tangguh dan berdaya saing;
- 3 Mewujudkan infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif;
- 4 Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Pencapaian target dan sasaran SDGs.

Prioritas pembangunan yang ada tersebut, kemudian dijadikan acuan untuk membuat prioritas tahunan, walaupun jumlah dan arahnya cenderung identik, hal tersebut didasarkan karena permasalahan strategis yang disasar cenderung membutuhkan penanganan yang berkelanjutan, diharapkan dapat diselesaikan secara komprehensif dengan pendekatan menyeluruh. Untuk menjamin konsistensinya maka dibuat persandingan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam RPJMD provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-

2021. Adapun hasil persandingan prioritas berdasarkan tingkatan pemerintahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026,
 Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2023,
 Dan Prioritas RPJMD Kota Palu 2021-2026

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD 2021-2026)	Prioritas Tahunan RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2023
1.	Penanggulangan Korban Bencana	Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
2.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi,

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD 2021-2026)	Prioritas Tahunan RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2023
			Tsunami dan Likuifaksi
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS • Rehabilitasi dan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD 2021-2026)	Prioritas Tahunan RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2023
			Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
4.	Mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan komoditi pertanian lainnya	Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

Sumber : RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026, RPJMD Kota Palu 2021-2026

Program prioritas disusun untuk menyelesaikan permasalahan strategis Kota Palu yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, sebagai Kota yang multifungsi, Kota Palu terus menghadapi permasalahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, budaya, adat, daya saing ekonomi, lingkungan dan sumber daya alam infrastruktur daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan						
		Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi					
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	103.921.400	
2	5. Mengembangkan cluster industri kreatif ditiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata						
		Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi					
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti			
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	109.358.200	
3	7. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan						

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Perhubungan	185.494.250	
4	8. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik						
		Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi					
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti			
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	147.234.900	
5	Ekonomi Mantap Berdaya Saing						
		Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan					
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan			
					Sekretariat Daerah	481.683.100	
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan					
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Persentase penurunan gangguan keamanan di Kota Palu			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	469.767.150	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya ketangguhan kota					
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.649.811.300	
				Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.649.811.300	
				Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.649.811.300	
				Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.649.811.300	
				Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.649.811.300	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	119.565.000	
		Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi					
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti			
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	133.033.400	
		Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan					
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.624.340.875	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.030.803.420	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase ormas yang ber-SKT dan Aktif			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	85.762.200	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.844.718.850	
			Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	39.855.000	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			
					Dinas Pariwisata	125.000.000	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan			
					Sekretariat Daerah	481.683.100	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.446.339.558	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Badan Pendapatan Daerah	14.045.152.804		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					

					Badan Pendapatan Daerah	2.152.883.450		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.587.205.459		
6	Lingkungan Mantap Berkelanjutan							
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Persentase capaian penanganan kerawanan pangan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	249.647.084		
		Meningkatnya ketangguhan kota						
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	738.947.010		
				Persentase capaian peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	738.947.010		
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Persentase capaian penanganan kerawanan pangan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	124.823.542		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase capaian pengawasan keamanan pangan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	38.811.500		
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik						
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Indeks Kepuasan Masyarakat (KEK)				
					Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	218.541.550		
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
				Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.791.900		
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	124.730.000		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.238.359.080		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	496.397.462		
				Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	496.397.462		
				Persentase penyelesaian sengketa konsumen				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	496.397.462		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	72.450.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN TATANGA)				
					Kecamatan Tatanga	1.108.884.550		
			Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur permukiman yang berketahanan					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
					Dinas Perhubungan	5.282.948.882		
				Persentase layanan angkutan darat				
					Dinas Perhubungan	5.282.948.882		
				Rasio konektivitas kabupaten/kota				
					Dinas Perhubungan	5.282.948.882		
			Meningkatnya kualitas pendidikan					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
					Sekretariat Daerah	7.217.746.748		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial					
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota				
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	49.065.000		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun				
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	741.177.300		
				Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)				
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	741.177.300		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	1.559.250.450		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Cakupan pengembangan UMKM				
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	100.011.342		
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha				
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	100.011.342		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN TATANGA)				
					Kecamatan Tatanga	16.958.173.650		
			Meningkatnya penataan regulasi daerah					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
					Sekretariat Daerah	3.608.873.374		
			Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup					
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Cakupan perencanaan lingkungan hidup				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Lingkungan Hidup	370.092.860		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	653.413.697		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				
					Dinas Lingkungan Hidup	3.305.018.800		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota				
					Dinas Lingkungan Hidup	40.681.650		
				Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
					Dinas Lingkungan Hidup	40.681.650		
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat				
					Dinas Lingkungan Hidup	162.000.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase jumlah sampah yang tertangani				
					Dinas Lingkungan Hidup	13.932.936.680		
			Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi					
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Cakupan pemasaran pariwisata				
					Dinas Pariwisata	323.512.998		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.662.200		
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.662.200		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti				
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	101.955.100		
		Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan						
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
					Sekretariat Daerah	10.826.620.122		
		Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah						
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase pemenuhan tenaga kerja bersertifikasi				
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	265.945.900		
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase koperasi aktif				
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	116.042.150		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Persentase koperasi sehat				
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	144.018.800		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	519.750.150		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Cakupan pengembangan UMKM				
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	33.337.114		
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha				
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	33.337.114		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)			
					Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	87.568.500	
				Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)			
					Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	87.568.500	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	218.541.550	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal			
					Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	19.885.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal			
					Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	90.728.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Produksi perikanan tangkap (ton)			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.203.612.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Produksi perikanan budidaya (ton)			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	766.591.900	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	135.192.465	
				Persentase capaian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	135.192.465	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Cakupan Pemasaran Pariwisata			
					Dinas Pariwisata	323.512.998	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			
					Dinas Pariwisata	271.950.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.038.996.220	
				Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.038.996.220	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	608.963.950	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	285.174.580	
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	285.174.580	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Cakupan Bina Kelompok Tani (%)			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	642.453.050	
				Persentase capaian pelaksanaan penyuluhan pertanian			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	642.453.050	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	124.730.000	
				Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	124.730.000	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.238.359.080		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	338.902.400		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	496.397.462		
				Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	496.397.462		
				Persentase penyelesaian sengketa konsumen				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	496.397.462		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Cakupan Bina IKM				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.756.897.051		
				Cakupan perencanaan dan pembangunan industri				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.756.897.051		
				Persentase IKM yang memiliki izin				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.756.897.051		
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.756.897.051		
				Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.756.897.051		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	72.450.000		
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	72.450.000	
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	72.450.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.662.200	
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.662.200	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
					Sekretariat Daerah	3.608.873.374	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Satuan Polisi Pamong Praja	4.140.000	
					Dinas Lingkungan Hidup	11.344.873.173	
					Dinas Perhubungan	10.746.275.371	
					Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	5.027.554.703	
					Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	2.399.960.590	
					Dinas Pariwisata	4.317.236.157	
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.491.324.252	
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.059.599.704	
					Sekretariat Daerah	90.000.000	
					Kecamatan Tatanga	7.575.563.161	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				

					Kecamatan Tatanga	17.791.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Tatanga	146.145.000	
7	Infrastruktur Mantap Berketahanan						
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
			Persentase penduduk berakses air minum				
					Dinas Pekerjaan Umum	4.890.614.450	
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan				
					Dinas Pekerjaan Umum	4.890.614.450	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			Persentase drainase dalam kondisi baik				
					Dinas Pekerjaan Umum	5.726.664.520	
			Persentase jalan yang memiliki drainase				
					Dinas Pekerjaan Umum	5.726.664.520	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
			Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan				
					Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	752.128.500	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
			Persentase penataan bangunan dan lingkungannya				
					Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	351.887.400	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
			Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk				
					Dinas Pekerjaan Umum	100.456.903.982	
			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota				
					Dinas Pekerjaan Umum	100.456.903.982	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
			Persentase ketaatan terhadap RTRW				
					Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	380.072.250	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
			Cakupan Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36.960.425.200	
				Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36.960.425.200	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
				Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi			
					Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	21.300.000	
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
				Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan			
					Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	10.022.450	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
				Cakupan penatagunaan tanah			
					Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	394.196.500	
			Meningkatnya ketangguhan kota				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase ketaatan terhadap RTRW			
					Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	380.072.250	
			Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur permukiman yang berketahanan				
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			
					Dinas Pekerjaan Umum	2.985.622.900	
				Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum	2.985.622.900	
				Rasio jaringan irigasi			
					Dinas Pekerjaan Umum	2.985.622.900	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Persentase penduduk berakses air minum			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum	4.890.614.450	
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan			
					Dinas Pekerjaan Umum	4.890.614.450	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
					Dinas Pekerjaan Umum	332.659.800	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Persentase drainase dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum	5.726.664.520	
				Persentase jalan yang memiliki drainase			
					Dinas Pekerjaan Umum	5.726.664.520	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal			
					Dinas Pekerjaan Umum	31.513.639.463	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota			
					Dinas Pekerjaan Umum	100.456.903.982	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Cakupan pengembangan jasa konstruksi			
					Dinas Pekerjaan Umum	140.126.730	
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			
					Dinas Pekerjaan Umum	140.126.730	
				Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
					Dinas Pekerjaan Umum	140.126.730	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.104.683.500	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.352.075.123	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.096.202.500	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Cakupan Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36.960.425.200	
			Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase ketaatan terhadap RTRW			
					Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	380.072.250	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Pekerjaan Umum	16.404.211.968	
					Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	6.117.340.248	
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.687.026.808	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				

					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.749.344.000	
8	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter						
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)			
					Dinas Sosial	14.768.525.400	
		Meningkatnya ketangguhan kota					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase capaian penanganan bencana				
					Dinas Sosial	710.905.910		
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				
					Dinas Sosial	710.905.910		
			Meningkatnya kinerja pelayanan publik					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
					Kecamatan Mantikulore	18.216.800		
					Kecamatan Tawaeli	20.756.900		
					Kecamatan Palu Utara	9.181.800		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU SELATAN)				
					Kecamatan Palu Selatan	5.989.607.500		
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN MANTIKULORE)				
					Kecamatan Mantikulore	7.919.568.172		
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU BARAT)				
					Kecamatan Palu Barat	5.213.125.050		
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU TIMUR)				
					Kecamatan Palu Timur	4.390.131.614		
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN TAWAELI)				
					Kecamatan Tawaeli	5.467.908.092		
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN ULUJADI)				
					Kecamatan Ulujadi	6.516.533.304		
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU UTARA)				
					Kecamatan Palu Utara	583.694.500		
			Meningkatnya kualitas pendidikan					
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
					Dinas Sosial	1.841.572.908	
				Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis			
					Dinas Sosial	1.841.572.908	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
					Sekretariat Daerah	12.994.271.344	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
					Dinas Sosial	1.723.687.500	
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
				Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			
					Dinas Sosial	84.000.000	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
					Dinas Sosial	2.762.359.362	
				Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis			
					Dinas Sosial	2.762.359.362	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)			
					Dinas Sosial	22.152.788.100	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				indeks pembangunan gender (IPG)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77.125.170	
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45.002.700	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Rasio KDRT				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	505.065.540		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	415.361.400		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	102.158.550		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Indeks Kota Layak Anak				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	839.612.979		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Cakupan perlindungan khusus anak				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62.361.450		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	20.231.199.642		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	1.324.977.375		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan palu selatan				
					Kecamatan Palu Selatan	17.968.822.500		
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kecamatan Mantikulore)				
					Kecamatan Mantikulore	23.758.704.516		
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU BARAT)				
					Kecamatan Palu Barat	2.823.624.750		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU TIMUR)			
					Kecamatan Palu Timur	13.170.394.842	
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN TAWAELI)			
					Kecamatan Tawaeli	16.403.724.276	
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN ULUJADI)			
					Kecamatan Ulujadi	19.549.599.912	
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (KECAMATAN PALU UTARA)			
					Kecamatan Palu Utara	14.886.485.820	
		Meningkatnya penataan regulasi daerah					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
					Sekretariat Daerah	6.497.135.672	
		Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi					
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti			
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	142.364.000	
		Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
					Sekretariat Daerah	19.491.407.016	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Mantikulore)			
					Kecamatan Mantikulore	500.625.000	
				Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Palu Utara)			
					Kecamatan Palu Utara	486.945.000	
		Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Sekretariat Daerah	6.497.135.672		

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

					Dinas Kesehatan	1.139.920.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Sosial	6.218.194.034		
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.379.857.890		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				indeks pembangunan gender (IPG)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.708.390		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				indeks kota layak anak				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.941.250		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP DPMPTSP				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.771.457.638		

					Dinas Pemuda dan Olahraga	3.987.060.738		
					Sekretariat Daerah	946.890.800		
					Kecamatan Palu Selatan	5.921.600		
				Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan				
					Kecamatan Palu Selatan	300.714.350		

					Kecamatan Palu Selatan	7.833.353.688		
					Kecamatan Mantikulore	10.448.119.453		
					Kecamatan Palu Barat	6.803.078.041		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Kecamatan Palu Timur	6.705.875.852		
					Kecamatan Tawaeli	6.371.328.324		
					Kecamatan Ulujadi	6.854.858.108		
					Kecamatan Palu Utara	5.763.201.762		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					Kecamatan Palu Selatan	13.855.800		
				indeks kepuasan masyarakat (IKM)				
					Kecamatan Mantikulore	18.216.800		

					Kecamatan Palu Barat	24.041.400		
					Kecamatan Palu Timur	4.250.000		
					Kecamatan Ulujadi	17.111.800		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

					Kecamatan Palu Selatan	88.411.750		
					Kecamatan Palu Barat	164.265.000		
					Kecamatan Palu Timur	157.830.000		
					Kecamatan Tawaeli	128.065.000		
					Kecamatan Ulujadi	157.315.000		
9	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas							
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			AFP Rate per 100.000 penduduk					
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528		
			Angka kelangsungan hidup bayi					
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528		
			Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup					
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528		
			Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup					
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528		
			Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Penderita Diare yang ditangani			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Persentase pemenuhan SPM Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Persentase penanggulangan kejadian luar biasa			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Prevalensi balita Stunting			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
				Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk)			
					Dinas Kesehatan	75.268.214.528	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan			
					Dinas Kesehatan	298.778.000	
				Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)			
					Dinas Kesehatan	298.778.000	
				Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	206.180.000		
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman				
					Dinas Kesehatan	821.340.600		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				
					Dinas Kesehatan	5.478.254.100		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	146.115.000		
				TFR (Angka Kelahiran Total)				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	146.115.000		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.208.128.218		
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.208.128.218		
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.208.128.218		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.213.394.100		
				Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.213.394.100		
				Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.213.394.100		
			Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan					
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota					
					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	31.255.300		
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.054.709.000		
			Meningkatnya ketangguhan kota					
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota					
					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.054.709.000		
			Meningkatnya kinerja pelayanan publik					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Usia Harapan Hidup					
					Dinas Kesehatan	37.634.107.264		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar					
					Dinas Kesehatan	149.389.000		
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA					
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.077.449.910		
			Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk					
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.077.449.910		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah					
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.823.500		
			Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian					
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.823.500		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan Penerbitan Akta Perceraian			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.823.500	
				Kepemilikan akta kelahiran			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.823.500	
				Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.823.500	
				Persentase pemenuhan kebutuhan pencatatan sipil masyarakat			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.823.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	121.520.010	
				Cakupan pengelolaan profil kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.191.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
				Cakupan pengelolaan profil kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.800.000	
		Meningkatnya kualitas pendidikan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	165.971.765.120	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	300.635.464.100	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				

					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.248.434.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Kesehatan	62.354.159.256	
					Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	110.612.359.607	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

					Dinas Kesehatan	15.710.061.504		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.776.332.688		
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.269.800		
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.427.786.676		
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.940.558.173		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					

					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	786.453.600		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					

					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	28.830.610		
10	Pemerintahan Mantap Melayani							
		Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan						
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan				
					Sekretariat Daerah	2.272.571.250		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				
					Sekretariat DPRD	15.434.605.600		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah				
					Badan Perencanaan Pembangunan daerah	1.047.044.800		
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				AFP Rate per 100.000 penduduk			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Angka kelangsungan hidup bayi			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Penderita Diare yang ditangani			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Persentase pemenuhan SPM Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Persentase penanggulangan kejadian luar biasa			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Prevalensi balita Stunting			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
				Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk)			
					Dinas Kesehatan	3.337.700	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
					Satuan Polisi Pamong Praja	3.390.720.000	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			
					Satuan Polisi Pamong Praja	3.390.720.000	
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan					
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
					Satuan Polisi Pamong Praja	1.695.360.000	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			
					Satuan Polisi Pamong Praja	1.695.360.000	
		Meningkatnya ketangguhan kota					
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase capaian penanganan bencana			
					Dinas Sosial	64.500.000	
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
					Dinas Sosial	64.500.000	
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Usia Harapan Hidup			
					Dinas Kesehatan	1.668.850	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	166.232.500	
		Meningkatnya kualitas pendidikan					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
					Sekretariat Daerah	13.326.556.460	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya mutu aparatur sipil negara					
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.571.386.000	
				Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	818.813.050	
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	818.813.050	
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	818.813.050	
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.571.386.000	
				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.571.386.000	
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.571.386.000	
				Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	818.813.050	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	516.953.700	
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	516.953.700	
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	516.953.700	
				Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	516.953.700	
		Meningkatnya penataan regulasi daerah					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
					Sekretariat Daerah	6.663.278.230	
		Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi					
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Cakupan pengelolaan aplikasi informatika			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	4.401.908.900	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	182.099.100	
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	182.099.100	
				Persentase pemenuhan data statistik sektoral			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	182.099.100	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	129.859.950	
				Persentase implementasi inovasi daerah			
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	185.005.300	
		Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
					Sekretariat Daerah	19.989.834.690	
		Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah					
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	215.059.800	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	166.232.500	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
					Sekretariat Daerah	6.663.278.230	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan			
					Sekretariat Daerah	2.272.571.250	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Satuan Polisi Pamong Praja	12.588.489.170	
					Dinas Komunikasi dan Informatika	4.817.529.752	
				Nilai SAKIP DPMPTSP			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.429.544.150	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.480.800		
					Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	46.250.000		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81.892.500		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	101.521.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	573.949.330		
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95.742.500		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					

					Dinas Komunikasi dan Informatika	216.103.700		
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					

					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	180.692.500		
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					

					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	32.980.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.185.981.561		
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					

					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	136.734.000		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					

					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	26.898.115		
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					

					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.675.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Sekretariat Daerah	24.787.277.506		
					Sekretariat DPRD	27.680.632.248		
					Badan Perencanaan Pembangunan daerah	5.603.733.343		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					

					Badan Perencanaan Pembangunan daerah	2.132.753.850		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.562.395.626		
					Badan Pendapatan Daerah	838.434.350		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					

					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.053.802.100		
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					

					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.770.235.650		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.247.670.415		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					

					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	529.172.200		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					

					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.967.500.250		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.867.172.316		
					Inspektorat	8.707.811.608		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					

					Inspektorat	1.383.719.300		
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					

					Inspektorat	99.858.150		

IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon anggaran sementara yang disusun menjadi pagu indikatif berdasarkan urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Pagu indikatif yang dituangkan dalam bentuk tabulasi sebagai plafon anggaran sementara, perlu dirasionalisasikan dengan seksama, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi pagu definitif untuk masing-masing program kegiatan pada setiap PD, dengan lebih mengefisienkan belanja dan meningkatkan kapasitas aparatur.

Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya telah mengacu pada Renstra PD dan diturunkan menjadi rencana kerja tahunan PD yang kemudian dipetakan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan dimutakhirkan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Selanjutnya, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan ditampilkan pada Tabel 4.1.

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	384.869.781.460	
1.01.1.01.2.22.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	384.869.781.460	
1.01.1.01.2.22.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	384.869.781.460	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	300.635.464.100	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	272.320.000	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.095.000	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	92.975.000	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.900.000	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.350.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	298.620.154.946	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	298.576.684.946	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	43.470.000	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.350.000	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.350.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.315.000	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.315.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	452.505.670	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.870.220	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.818.450	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.100.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.025.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.692.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970.763.600	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	331.500.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	639.263.600	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.054.884	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	223.380.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.700.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.974.884	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	82.985.882.560	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	53.567.301.000	
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	66.000.000	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	15.187.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	22.510.279.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	30.800.700.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	139.080.000	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	36.055.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.366.327.000	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	33.000.000	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	16.187.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.600.000.000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	33.000.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	19.640.700.000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	43.440.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.329.959.610	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	257.900	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	213.744.260	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	107.657.450	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.008.200.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.722.294.950	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	238.319.800	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.975.150	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.466.000.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.248.434.800	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.248.434.800	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	527.505.000	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	720.929.800	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	230.854.552.831	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	120.139.103.224	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	103.289.121.720	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.354.159.256	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	385.004.500	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.205.900	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	221.501.300	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40.993.300	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.454.150	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.849.850	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.097.571.956	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.067.819.406	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.875.050	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.309.950	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.920.000	
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.647.550	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.360.000	
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6.360.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.620.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.620.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.577.950	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.938.300	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.304.900	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.777.200	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.668.050	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.380.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.037.500	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.972.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.917.805.850	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	867.556.250	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.050.249.600	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.464.219.000	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	426.900.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.011.569.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.250.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	37.635.776.114	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.294.811.779	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.505.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.127.719.111	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	208.807.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.639.785.668	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	813.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.224.359.625	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	626.127.500	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	24.931.100	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	26.475.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	9.849.900	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	191.735.100	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16.625.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	733.724.850	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14.000.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	320.320.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	736.250	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	37.350.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.612.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	324.500.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	812.116.150	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.025.150	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	869.850	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.668.850	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	6.324.850	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.812.350	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.750.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.185.742.350	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	522.532.350	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.426.745.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	1.875.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.894.400	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	15.600.100	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	9.734.029.825	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.587.550	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	122.960.950	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.374.850	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	33.462.550	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	106.119.460	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	57.979.210	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	39.610.250	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	8.530.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.485.250	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	4.985.150	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.887.550	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	3.612.550	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	149.389.000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.264.400	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.264.400	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.224.800	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.224.800	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	146.899.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	146.899.800	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	410.670.300	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	299.724.000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	299.724.000	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.925.150	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.925.150	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.869.150	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.869.150	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	107.152.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	107.152.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.739.127.050	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.238.900	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.238.900	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	490.981.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	490.981.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.244.907.150	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.244.907.150	
1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Pantoloan	879.912.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	879.912.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	879.912.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	879.912.000	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Tawaeli	708.984.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	708.984.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	708.984.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	708.984.000	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Mamboro	840.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	840.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	840.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Talise	1.944.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.944.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.944.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.944.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Singgani	2.402.901.506	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.402.901.506	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.402.901.506	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.402.901.506	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Kawatuna	900.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	900.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	900.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Birobuli	1.559.774.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.559.774.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.559.774.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.559.774.000	
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Bulili	724.632.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	724.632.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	724.632.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	724.632.000	
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Mabelopura	1.139.920.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.139.920.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.139.920.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.139.920.000	
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Sangurara	1.800.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.800.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.800.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Kamonji	2.279.880.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.279.880.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.279.880.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.279.880.000	
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Anuntodea Tipo	837.600.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	837.600.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	837.600.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	837.600.000	
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nosarara	472.377.998	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	472.377.998	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	472.377.998	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	472.377.998	
1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Lere	360.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	360.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	360.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	360.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	110.715.449.607	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	110.715.449.607	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.612.359.607	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.545.304.908	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.545.304.908	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	71.067.054.699	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	71.067.054.699	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	103.090.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	103.090.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	103.090.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	170.508.974.211	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.1.03.1.03.02.0000	Dinas Pekerjaan Umum	162.907.545.813	
1.03.1.03.1.03.02.0000	Dinas Pekerjaan Umum	162.907.545.813	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.404.211.968	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.208.400	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.757.900	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.930.000	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22.700.000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.820.500	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.709.612.337	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.693.693.337	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.919.000	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	205.125.000	
1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	205.125.000	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.000.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130.000.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.453.410	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.523.400	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.779.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.805.010	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.471.500	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.930.000	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.792.500	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.152.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.904.900.000	
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	397.700.000	
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	3.500.000.000	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.200.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.965.716.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.400.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.817.316.800	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.820.196.021	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.860.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.815.450	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.125.914.706	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.605.865	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.985.622.900	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	743.510.000	
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	743.510.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.242.112.900	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	106.049.850	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.721.271.250	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	414.791.800	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.890.614.450	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.890.614.450	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	179.117.200	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	304.600.000	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.265.712.250	
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.141.185.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	332.659.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	332.659.800	
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	54.755.000	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	277.904.800	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.726.664.520	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.726.664.520	
1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	352.700.000	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	4.590.452.020	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	783.512.500	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	31.513.639.463	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	31.513.639.463	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	31.513.639.463	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100.914.005.982	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100.914.005.982	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.056.412.900	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	603.950.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	513.905.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	54.738.208.400	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	11.816.496.800	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	25.090.671.600	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.637.259.282	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	457.102.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	140.126.730	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	81.599.230	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	81.599.230	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	58.527.500	
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	58.527.500	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.601.428.398	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.601.428.398	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.117.340.248	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.257.000	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	929.600	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.732.200	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.732.200	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	863.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.945.099.968	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.944.648.168	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	451.800	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	463.100	
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	300.000	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	163.100	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.490.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.490.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.862.880	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.276.500	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.797.580	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.299.950	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.940.850	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.400.000	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.095.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.053.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.209.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	57.682.100	
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.527.200	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.146.620.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.740.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.003.880.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.338.000	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	246.130.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.308.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.900.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	752.128.500	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	752.128.500	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	668.042.200	
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	84.086.300	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	351.887.400	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	351.887.400	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	218.916.700	
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	132.970.700	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	380.072.250	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	99.564.200	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	33.665.000	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	65.899.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	22.540.000	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	22.540.000	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	257.968.050	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	62.677.650	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	64.167.400	
1.03.12.2.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	31.207.500	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	99.915.500	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52.949.757.131	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	52.949.757.131	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	52.949.757.131	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.687.026.808	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.029.400	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.337.400	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.364.800	
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.989.800	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.337.400	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.040.037.027	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.034.397.227	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.639.800	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	481.333.581	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.116.000	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.138.700	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.450.750	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.983.631	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.437.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.607.000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.230.000	
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.230.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	682.816.800	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	616.816.800	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.580.000	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	221.395.000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.235.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.700.000	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.250.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.104.683.500	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	702.500.000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100.000.000	
1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	602.500.000	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	269.331.000	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	269.331.000	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	132.852.500	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	132.852.500	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.101.419.123	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.352.075.123	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	750.865.000	
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	3.601.210.123	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.749.344.000	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.979.891.500	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	769.452.500	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.096.202.500	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.096.202.500	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.806.750.000	
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.289.452.500	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	36.960.425.200	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	36.960.425.200	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.225.014.700	
1.04.05.2.01.05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	35.735.410.500	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	31.226.271.516	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.831.041.688	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.831.041.688	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.776.332.688	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.762.800	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.987.800	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.270.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.902.500	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	602.500	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.168.245.308	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.167.135.008	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.110.300	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.791.500	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.880.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.116.250	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.568.250	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.227.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.493.000	
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.393.000	
1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.100.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.881.692.800	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.380.800	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.831.312.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.347.280	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.072.280	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.950.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.325.000	
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.054.709.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.023.453.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.362.800	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	459.437.600	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	118.208.792	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	380.715.308	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	39.229.050	
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	500.150	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	9.762.500	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.100.000	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	8.662.500	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	1.700.000	
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1.700.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	19.792.800	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	19.792.800	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	14.287.989.170	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	14.287.989.170	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.592.629.170	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.680.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	540.000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.400.000	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.200.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	540.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.926.764.200	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.926.404.200	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	360.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	623.415.850	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.419.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.400.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.296.550	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.192.300	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.020.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.088.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	282.926.320	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.750.000	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.000.000	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.176.320	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.713.341.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.524.800	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.622.816.200	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	941.501.800	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	264.490.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	642.536.800	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.850.000	
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.625.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.695.360.000	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.695.360.000	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.232.280.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	139.080.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	324.000.000	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.107.240.658	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.107.240.658	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.457.429.358	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.604.800	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.269.800	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.400	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.319.800	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.014.800	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.200.646.628	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.196.950.878	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.695.750	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.472.380	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.275.900	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.470.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.314.730	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.718.750	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.620.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.250.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.823.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.820.000	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.820.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.181.200	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.569.600	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.611.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.704.350	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	223.900.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.741.050	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.200.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.463.300	
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.400.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.649.811.300	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.602.573.400	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	22.900.150	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	24.424.800	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.377.196.500	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	45.550.450	
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	72.501.500	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	934.327.900	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	469.989.200	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	464.338.700	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	112.910.000	
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	112.910.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.901.211.598	
1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	15.901.211.598	
1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	15.901.211.598	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.218.194.034	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.687.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	562.500	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.000	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.625.000	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.336.681.246	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.329.756.246	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.925.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	616.467.200	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.317.650	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.096.550	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.928.000	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.003.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.022.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.550.000	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.550.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	801.220.088	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	732.820.088	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.588.000	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	256.900.000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.088.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.400.000	
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.200.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	574.562.500	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20.500.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	554.062.500	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	278.500.000	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	82.300.000	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	172.500.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9.575.000	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	11.187.500	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	28.000.000	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	28.000.000	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	28.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	920.786.454	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	903.761.454	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	19.450.500	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	64.025.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	820.285.954	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	17.025.000	
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	17.025.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.384.262.700	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.384.262.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	471.460.000	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	6.912.802.700	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	775.405.910	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	628.955.910	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	282.780.700	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	267.550.210	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	64.500.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	14.125.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	146.450.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	146.450.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	529.360.000	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	529.360.000	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	529.360.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	265.945.900	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	265.945.900	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	265.945.900	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	16.355.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	16.355.000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	16.355.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	247.059.100	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	247.059.100	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	247.059.100	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.062.087.153	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.062.087.153	
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.062.087.153	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.379.857.890	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.075.000	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	225.000	
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.350.000	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.117.158.972	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.117.158.972	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.694.250	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.176.100	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.850.900	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.447.650	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.248.600	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.990.000	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.300.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.681.000	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291.672.000	
2.08.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	291.672.000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.507.668	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.632.668	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.875.000	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.750.000	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.770.000	
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.480.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	40.709.290	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	25.708.390	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	16.233.250	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	9.475.140	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.900	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.900	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	168.355.180	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	16.053.150	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.053.150	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	152.302.030	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	152.302.030	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	138.453.800	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.581.050	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.238.800	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	19.342.250	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.872.750	
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.872.750	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	34.052.850	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.052.850	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	34.052.850	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	279.870.993	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	40.941.250	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40.941.250	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	238.929.743	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	107.246.183	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.683.560	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	20.787.150	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.787.150	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.787.150	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	902.582.052	
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	902.582.052	
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	902.582.052	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	738.947.010	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	485.415.450	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	468.641.200	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	16.774.250	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	253.531.560	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	50.066.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	203.465.560	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	124.823.542	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	124.823.542	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	124.823.542	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	38.811.500	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	38.811.500	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	38.811.500	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	425.518.950	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	425.518.950	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	425.518.950	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	21.300.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.300.000	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.300.000	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	10.022.450	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.022.450	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.022.450	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	394.196.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	394.196.500	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	384.782.000	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	9.414.500	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	29.809.016.860	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	29.809.016.860	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	29.809.016.860	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.344.873.173	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.981.500	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	725.250	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.094.200	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.091.750	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.070.300	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.461.054.323	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.458.560.673	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.493.650	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.237.450	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.055.350	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.648.600	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.300.000	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.862.500	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.371.000	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.300.000	
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.300.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.523.026.800	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.810.400	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.418.216.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	908.273.100	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	618.979.600	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.781.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.400.000	
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.112.500	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	370.092.860	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	370.092.860	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	370.092.860	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	653.413.697	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	602.269.997	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	105.787.170	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	496.482.827	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	29.490.700	
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	29.490.700	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	21.653.000	
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	21.653.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.305.018.800	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.305.018.800	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.087.792.600	
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	2.217.226.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	40.681.650	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.681.650	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	20.877.650	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.804.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	162.000.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162.000.000	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	162.000.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13.932.936.680	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	13.932.936.680	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	13.088.893.980	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	844.042.700	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.842.380.096	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.842.380.096	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.842.380.096	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.427.786.676	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.829.060	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.347.200	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.990.000	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.550.000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.941.860	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.499.240.216	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.490.338.216	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.902.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.838.700	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.325.500	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.784.000	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.897.900	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.047.300	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.120.000	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.706.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.958.000	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.500.000	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.500.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.196.588.700	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.400.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.044.188.700	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.790.000	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.380.000	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.410.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.077.449.910	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	963.901.910	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	28.800.000	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	725.749.460	
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	72.000.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	132.300.000	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5.052.450	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	113.548.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	113.548.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	192.823.500	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	192.727.500	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	23.340.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	169.387.500	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	96.000	
2.12.03.2.03.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	96.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	121.520.010	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	88.328.510	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	36.525.000	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	51.803.510	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	33.191.500	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.100.000	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.091.500	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	22.800.000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	22.800.000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	22.800.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.224.376.832	
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.224.376.832	
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.224.376.832	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.940.558.173	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.243.500	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.014.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.264.000	
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.951.500	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.014.000	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.716.662.213	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.716.662.213	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.101.260	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	683.000	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.520.060	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.907.200	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.391.000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546.655.200	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.800.000	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	472.855.200	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.896.000	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	368.496.000	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.400.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	73.057.500	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	10.307.500	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	10.307.500	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	62.750.000	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4.240.000	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	5.320.000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	53.190.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.604.064.109	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	581.174.600	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	24.974.800	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	63.024.800	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	124.800.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	324.000.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	220.800.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	220.800.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	755.324.609	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.010.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	646.655.609	
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	10.844.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	40.000.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.800.000	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20.015.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	46.764.900	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6.264.900	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	40.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	4
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.606.697.050
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.606.697.050
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	134.880.000
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	414.765.000
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.993.546.500
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	63.505.550
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	16.235.160.203
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	16.235.160.203
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	16.235.160.203
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.952.211.321
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.622.250
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.622.400
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.825.350
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.420.350
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.754.150
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.202.691.371
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.182.249.671
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.441.700
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	139.756.000
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.504.150
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.566.850

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63.685.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.698.700	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.341.650	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.641.750	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.916.600	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.925.700	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.400.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.320.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.153.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.620.000	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.620.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.337.548.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.731.200	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.210.816.800	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	601.275.000	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	270.400.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.025.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.950.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.282.948.882	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	118.047.850	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	53.473.100	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	64.574.750	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	42.456.250	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	42.456.250	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.385.513.100	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.385.513.100	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.988.219.092	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.988.219.092	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	151.085.000	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	125.320.600	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	25.764.400	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	23.570.950	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	23.570.950	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	44.034.120	
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	44.034.120	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.213.908.920	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.213.908.920	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	316.113.600	
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	316.113.600	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.434.498.452	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.434.498.452	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.434.498.452	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.817.529.752	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.916.700	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.830.000	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.874.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.874.700	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.337.300	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.734.136.802	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.722.947.802	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.189.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.636.250	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	879.200	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.250.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.292.450	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.835.600	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.620.000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.650.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.109.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.620.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.400.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.220.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.220.000	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	267.720.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.850.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.850.000	
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.800.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	215.059.800	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	215.059.800	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	215.059.800	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.401.908.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.401.908.900	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3.895.755.400	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	348.183.000	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	94.649.800	
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	63.320.700	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.880.557.917	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	5.880.557.917	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	5.880.557.917	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.027.554.703	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.914.500	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.109.500	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.302.500	
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.054.500	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.448.000	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.836.464.940	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.832.233.940	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.231.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.153.663	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.304.000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.817.000	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.510.413	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.492.250	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.600.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.430.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.743.600	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.600.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.143.600	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.278.000	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.988.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.540.000	
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.750.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	116.042.150	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	116.042.150	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	116.042.150	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	144.018.800	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	144.018.800	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	144.018.800	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	559.605.150	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	559.605.150	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	39.855.000	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	519.750.150	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	33.337.114	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	33.337.114	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	33.337.114	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.113.754.058	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.250.820.418	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.250.820.418	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.231.482.588	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.315.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	740.000	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.105.000	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	730.000	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	740.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.771.707.638	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.771.457.638	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	125.000	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	125.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.170.000	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.170.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.115.950	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	565.500	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.599.500	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.323.950	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.600.000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.785.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.242.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.480.800	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20.519.100	
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.961.700	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	664.367.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	327.700.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.667.200	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.326.000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	269.700.000	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.900.000	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.050.000	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.776.000	
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.900.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	166.232.500	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	84.045.000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	66.640.000	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.405.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	82.187.500	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	53.187.500	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	29.000.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	81.892.500	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	81.892.500	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	33.442.500	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	48.450.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	101.521.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	101.521.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50.240.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	20.331.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30.950.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	573.949.330	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	573.949.330	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	104.313.800	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	382.351.680	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	87.283.850	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	95.742.500	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.742.500	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	95.742.500	
2.18.0.00.0.00.02.0000	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	2.862.933.640	
2.18.0.00.0.00.02.0000	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	2.862.933.640	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.446.210.590	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.225.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.275.000	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	250.000	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250.000	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.450.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.755.805.540	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.754.930.540	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	625.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	250.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.754.050	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.276.500	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.069.000	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.091.200	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.336.350	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	950.000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.665.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.366.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.000.000	
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.451.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.451.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.975.000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201.450.000	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.400.000	
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.125.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	87.568.500	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	87.568.500	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	637.500	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	86.931.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	218.541.550	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	218.541.550	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	124.004.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	9.163.550	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1.225.000	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	84.149.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	19.885.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.885.000	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	11.250.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	935.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	7.700.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	90.728.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.728.000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	90.728.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.172.453.077	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	11.172.453.077	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	11.172.453.077	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.987.060.738	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.800.000	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.800.000	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.890.640.988	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.890.640.988	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.923.150	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.354.000	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.840.000	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.857.150	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.400.000	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.570.000	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.260.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.642.000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.440.600	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394.440.600	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.256.000	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	211.756.000	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.743.733.214	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.979.700.504	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.898.781.400	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	398.081.690	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	2.682.837.414	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	764.032.710	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	764.032.710	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	441.659.125	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	441.659.125	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	441.659.125	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	182.099.100	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	182.099.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	182.099.100	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	182.099.100	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	182.099.100	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	140.974.850	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	6.674.750	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	34.449.500	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	216.103.700	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	216.103.700	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	216.103.700	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	216.103.700	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	216.103.700	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.466.200	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	112.320.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	54.317.500	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	815.284.210	
1.01.1.01.2.22.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	815.284.210	
1.01.1.01.2.22.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	815.284.210	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	786.453.600	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	469.353.600	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	469.353.600	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	317.100.000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	317.100.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	28.830.610	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.830.610	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	28.830.610	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	213.672.500	
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	213.672.500	
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	213.672.500	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	180.692.500	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.342.500	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	26.440.000	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.565.000	
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	16.238.000	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.895.500	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	26.935.000	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.269.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.350.000	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	27.955.000	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	14.687.500	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.707.500	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	32.980.000	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	32.980.000	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	32.980.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	6.353.288.676	
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.353.288.676	
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.353.288.676	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.185.981.561	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.375.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	
2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.875.000	
2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.250.000	
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.250.000	
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.793.900.786	
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.787.950.786	
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.300.000	
2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.650.000	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.530.771.375	
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.131.513.025	
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.189.750	
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.150.600	
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.180.000	
2.24.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.480.000	
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.258.000	
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	538.104.400	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.000.000	
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.104.400	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.830.000	
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	276.000.000	
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.080.000	
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	
2.24.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.250.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	136.734.000	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	19.511.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	6.530.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	12.981.500	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	35.415.000	
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	4.754.000	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	30.661.000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	81.807.500	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	66.162.500	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	15.645.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	26.898.115	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5.188.765	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5.188.765	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	4.003.500	
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	4.003.500	
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	17.705.850	
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	17.705.850	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	3.675.000	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	3.675.000	
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	3.675.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.105.396.365	
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.105.396.365	
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.105.396.365	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.203.612.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.203.612.000	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.203.612.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	766.591.900	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	766.591.900	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	727.764.900	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.827.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	135.192.465	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	135.192.465	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.192.465	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.037.699.155	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	5.037.699.155	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	5.037.699.155	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.317.236.157	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.092.450	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.092.450	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.774.410.257	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.542.420.857	
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	231.989.400	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.118.950	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.800.000	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.249.450	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.933.500	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.100.000	
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.250.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.786.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.362.500	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.350.000	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.012.500	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.252.000	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	208.252.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	125.000.000	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	125.000.000	
3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	125.000.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	323.512.998	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	323.512.998	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	70.000.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	253.512.998	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	271.950.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	271.950.000	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	271.950.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17.089.703.952	
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17.089.703.952	
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17.089.703.952	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.491.324.252	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.623.900	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.570.700	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.815.000	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.214.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.024.200	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.354.278.552	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.350.228.552	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.050.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	597.605.200	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.765.500	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.049.700	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.614.200	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.500.800	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.575.000	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.552.100	
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.552.100	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.831.664.500	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.000.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.625.664.500	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	674.600.000	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	565.200.000	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.800.000	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.200.000	
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.400.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.038.996.220	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	593.549.270	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	57.132.070	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	104.373.400	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	432.043.800	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	445.446.950	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	445.446.950	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	608.963.950	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	608.963.950	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	578.844.950	
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	30.119.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	285.174.580	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	119.113.500	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	119.113.500	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	166.061.080	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	166.061.080	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	22.791.900	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.791.900	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	22.791.900	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	642.453.050	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	642.453.050	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	132.826.100	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	426.902.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	82.724.950	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10.257.988.646	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.257.988.646	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.257.988.646	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.059.599.704	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.963.500	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.395.500	
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.552.500	
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.552.500	
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.463.000	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.242.245.734	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.238.747.734	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.498.000	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	578.911.670	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.019.820	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.591.950	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.516.900	
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.050.000	
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.950.000	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.783.000	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.452.800	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.000.000	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	698.452.800	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.026.000	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308.420.000	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.406.000	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.200.000	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	124.730.000	
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	33.600.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	33.600.000	
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	91.130.000	
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	91.130.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.238.359.080	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.240.369.080	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	575.729.930	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.664.639.150	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	997.990.000	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	997.990.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	338.902.400	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	197.782.400	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	197.782.400	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	141.120.000	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	141.120.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	496.397.462	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	496.397.462	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	319.759.462	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	176.638.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.840.009.251	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.840.009.251	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.840.009.251	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.756.897.051	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.756.897.051	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	247.253.700	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	138.265.200	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	315.045.900	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1.056.332.251	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	72.450.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	72.450.000	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	72.450.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	10.662.200	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	10.662.200	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	10.662.200	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	45.347.709.932	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	45.347.709.932	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	45.347.709.932	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.824.168.306	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.838.000	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.655.000	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.764.000	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.764.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.655.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.830.277.918	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.824.502.918	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.772.000	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.003.000	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	53.000.000	
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	53.000.000	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.564.900	
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.564.900	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.083.611.200	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.134.450	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	451.384.450	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.676.800	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.832.112.500	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.670.303.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.919.800	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.919.800	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.204.839.050	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	649.126.400	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	954.100.250	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.595.612.400	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.318.844.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.031.320.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.200.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.824.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	956.093.088	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	831.743.088	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34.350.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.784.535.900	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	810.000.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	654.000.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	320.535.900	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	946.890.800	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	97.976.650	
4.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	618.911.500	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	118.850.500	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	111.152.150	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.525.753.650	
4.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	528.731.700	
4.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	126.821.950	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	870.200.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.769.287.276	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	3.350.389.430	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	2.547.811.080	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	274.056.850	
4.01.02.2.01.03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	528.521.500	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	12.114.162.496	
4.01.02.2.02.01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.608.873.374	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5.014.700.522	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.482.435.150	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.02.2.02.04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	390.595.300	
4.01.02.2.02.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.617.558.150	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.304.735.350	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	422.814.350	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	794.326.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	87.595.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.754.254.350	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	180.031.750	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	123.558.950	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	56.472.800	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.312.339.550	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1.248.938.400	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	39.944.850	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	23.456.300	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	960.231.700	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	567.827.700	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	254.959.100	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	137.444.900	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	301.651.350	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	301.651.350	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	43.115.237.848	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	43.115.237.848	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	43.115.237.848	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.680.632.248	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.492.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.592.000	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.312.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.962.500	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.625.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.531.092.159	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.515.492.159	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.600.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.657.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	114.657.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.265.834.458	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.601.048	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.415.000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.903.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	838.226.660	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.618.050	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	554.835.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	538.667.700	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.568.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.366.094	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.366.094	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.956.600	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.830.400	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	535.300.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.131.826.200	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.840.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.950.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.940.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.300.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.650.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	18.360.393.937	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17.916.508.937	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	243.885.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	200.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.434.605.600	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	505.446.200	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	505.446.200	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	77.742.500	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	9.740.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6.390.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	27.840.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	24.840.000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	8.932.500	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	30.244.250	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	30.244.250	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	719.940.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	90.940.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	281.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	348.000.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.407.313.150	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	320.294.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	5.087.019.150	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	8.693.919.500	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.665.532.000	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	28.387.500	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	8.783.531.993	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	8.783.531.993	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	8.783.531.993	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.603.733.343	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.325.850	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.031.950	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.376.550	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.240.000	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.677.350	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.744.612.943	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.707.868.193	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36.744.750	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	846.064.400	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.720.450	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.089.650	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.589.450	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.200.000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.800.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	705.164.850	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000	
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.526.950	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.320.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	587.206.950	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.203.200	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.703.200	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.500.000	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.179.798.650	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.047.044.800	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	68.030.600	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	37.012.600	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	48.003.700	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	57.882.400	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	337.867.650	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	16.929.350	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	481.318.500	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.200.618.750	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	366.021.900	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	504.857.500	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	329.739.350	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	932.135.100	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	250.534.050	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	84.533.800	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	597.067.250	
5.02	KEUANGAN	47.422.903.980	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.386.433.376	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.386.433.376	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.562.395.626	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.256.100	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.979.300	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	200.779.800	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	32.315.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.181.200	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.521.745.666	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.492.687.466	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.426.500	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.631.700	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.019.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120.019.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.123.454.860	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.345.450	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.850.000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	221.068.050	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.288.760	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.920.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.750.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.185.000	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	280.047.600	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.791.190.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	554.800.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.236.390.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	746.730.000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.280.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.000.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.600.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.850.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	15.053.802.100	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.524.724.100	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	33.812.900	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	37.797.900	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	102.000.000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	102.000.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	698.516.350	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	65.067.750	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	94.086.750	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	98.700.000	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	333.419.950	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	959.322.500	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.940.374.250	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.121.260.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	266.264.950	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	225.138.700	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	161.470.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	157.655.800	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8.584.800	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.588.703.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	348.693.000	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	133.289.500	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	88.583.500	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	331.109.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	239.791.950	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	422.262.000	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	12.974.950	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	11.999.850	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.000.000.000	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.000.000.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.770.235.650	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.770.235.650	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	622.779.700	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	54.610.100	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	293.769.900	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	292.991.950	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	271.060.000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	188.629.800	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	770.626.300	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	150.024.900	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	104.561.950	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	460.100.050	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	363.252.000	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	197.829.000	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	17.036.470.604	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	17.036.470.604	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.883.587.154	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.768.500	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.239.000	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.239.000	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.239.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.051.500	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.356.322.904	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.349.988.904	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.334.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.000.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	837.621.550	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.464.500	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.223.100	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.160.150	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.134.800	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.200.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.775.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407.664.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	933.834.200	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.560.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	689.274.200	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.040.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	492.640.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.200.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.400.000	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.800.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.152.883.450	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.152.883.450	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	8.459.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	233.670.000	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	115.400.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	717.195.000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	195.368.750	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	321.480.200	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	148.800.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	308.950.500	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	41.110.000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	62.450.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	8.348.228.615	
5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8.348.228.615	
5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8.348.228.615	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.247.670.415	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.213.850	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.245.850	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.246.500	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.761.500	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.960.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.898.341.085	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.898.341.085	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	669.704.300	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.775.900	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.802.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.606.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.231.400	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.100.000	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	366.689.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	366.000.000	
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	366.000.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	866.396.180	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.102.080	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.294.100	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.015.000	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	352.440.000	
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.575.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.100.558.200	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	818.813.050	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	352.550.400	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	168.041.600	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	89.466.650	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	208.754.400	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	680.100.200	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	63.492.150	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	296.150.750	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	320.457.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	529.172.200	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	281.894.750	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	247.277.450	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	72.472.750	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	32.409.250	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40.063.500	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.484.453.950	
5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.484.453.950	
5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.484.453.950	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.484.453.950	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	516.953.700	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	516.953.700	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.967.500.250	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.967.500.250	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.919.904.566	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.919.904.566	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.919.904.566	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.867.172.316	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.425.000	
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000	
5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	
5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	
5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	175.000	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.103.805.266	
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.103.155.266	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	250.000	
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	400.000	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.430.850	
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	903.000	
5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.325.050	
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.903.800	
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000	
5.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.550.000	
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.189.000	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.123.200	
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.840.000	
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.283.200	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.388.000	
5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	213.848.000	
5.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.340.000	
5.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.200.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.052.732.250	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	364.848.450	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	101.955.100	
5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	129.859.950	
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	133.033.400	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	398.957.100	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	147.234.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	142.364.000	
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	109.358.200	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	103.921.400	
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	103.921.400	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	185.005.300	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	127.881.200	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	57.124.100	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	10.191.389.058	
6.01.6.01.0.00.01.0000	Inspektorat	10.191.389.058	
6.01.6.01.0.00.01.0000	Inspektorat	10.191.389.058	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.707.811.608	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.750.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.375.000	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.187.500	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.187.500	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.292.428.118	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.291.118.118	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.310.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.344.450	
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.812.500	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110.531.950	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.446.990	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.054.300	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.076.740	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.427.700	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.850.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.675.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.363.250	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.552.050	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.634.400	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.917.650	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.290.000	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	636.340.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.950.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.383.719.300	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.301.360.350	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	346.320.150	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	132.128.300	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	43.347.400	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	209.209.600	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	148.600.950	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	421.753.950	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	82.358.950	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	82.358.950	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	99.858.150	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	99.858.150	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12.300.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	87.558.150	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	106.753.413.391	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Palu Selatan	14.231.864.688	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Palu Selatan	14.231.864.688	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.139.989.638	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.921.600	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.361.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.581.500	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.618.250	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.360.850	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.794.540.788	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.794.540.788	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.714.350	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.551.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.788.450	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.160.650	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.154.250	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.150.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.130.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.780.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.826.500	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	17.826.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.372.900	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.626.400	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	598.746.500	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.613.500	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	302.501.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.200.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.912.500	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.855.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	13.855.800	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.855.800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.989.607.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.961.278.450	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.894.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	891.719.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.042.664.950	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.028.329.050	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.028.329.050	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88.411.750	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	88.411.750	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	88.411.750	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mantikulore	18.584.499.825	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mantikulore	18.584.499.825	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.479.839.853	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.227.900	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.465.400	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.490.500	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.490.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.781.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.234.210.533	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.232.084.533	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.126.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	924.046.220	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.702.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.707.780	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.710.400	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	363.785.940	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.036.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.715.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.389.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.010.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.010.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808.105.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.676.800	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	624.428.400	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.240.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436.540.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.800.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.900.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.216.800	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.216.800	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.216.800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.919.568.172	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.362.052.022	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81.345.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.940.912.972	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.339.794.050	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.557.516.150	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.557.516.150	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	166.875.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	166.875.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	166.875.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Palu Barat	12.204.509.491	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Palu Barat	12.204.509.491	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.803.078.041	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.459.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.465.400	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.338.500	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	851.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.804.100	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.942.929.541	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.941.196.341	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.733.200	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.638.700	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.299.300	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	269.281.600	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.118.800	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.450.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.450.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.039.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.270.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.850.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	69.085.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.335.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.924.400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.160.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	605.764.400	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.856.400	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	340.160.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.671.400	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.025.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.041.400	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24.041.400	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.041.400	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.213.125.050	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.271.916.800	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	52.697.650	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.311.244.626	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.907.974.524	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	941.208.250	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	941.208.250	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	164.265.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	164.265.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	164.265.000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Palu Timur	11.325.884.146	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Palu Timur	11.325.884.146	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.773.672.532	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.059.900	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.315.400	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.056.500	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.498.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.189.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.238.799.827	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.236.823.827	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.976.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.207.925	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.676.200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.200.725	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.404.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.665.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.462.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.125.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.125.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612.603.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.899.200	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.704.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.876.680	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	302.580.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.800.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.671.680	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.825.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.250.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.250.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.250.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.390.131.614	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.477.365.214	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	58.210.440	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.026.600.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.392.554.774	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	912.766.400	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	912.766.400	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	157.830.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	157.830.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	157.830.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Tatanga	13.392.223.711	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Tatanga	13.392.223.711	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.575.563.161	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.057.900	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.465.400	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.365.500	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.365.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.861.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.787.462.539	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.785.104.339	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.358.200	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	645.233.860	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.925.350	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.620.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	280.391.510	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.881.500	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.900.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.262.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.253.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.830.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	38.830.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.838.862	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.806.462	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	623.032.400	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.140.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	343.440.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.700.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.791.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.791.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.791.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.652.724.550	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.543.840.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	71.570.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.107.214.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.365.056.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.108.884.550	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.108.884.550	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	146.145.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	146.145.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	146.145.000	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Tawaeli	11.988.058.316	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Tawaeli	11.988.058.316	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.371.328.324	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.381.400	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.227.900	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.290.650	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.193.700	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.669.150	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.702.178.764	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.700.177.714	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.001.050	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	600.461.960	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.810.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	226.629.960	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.318.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.104.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.121.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542.321.200	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.185.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	288.500.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.210.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.475.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.756.900	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.756.900	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.756.900	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.467.908.092	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.817.498.942	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54.703.938	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.292.878.454	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.469.916.550	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	650.409.150	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	650.409.150	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	128.065.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	128.065.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	128.065.000	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Ulujadi	13.545.818.212	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Ulujadi	13.545.818.212	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.854.858.108	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.564.900	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.465.400	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.602.500	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.715.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.781.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.939.065.408	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.936.939.408	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.126.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	522.765.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	269.327.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.654.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.900.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.845.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.039.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	221.784.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	221.784.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	765.528.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.912.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	629.616.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.150.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	382.600.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.550.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.111.800	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.111.800	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.111.800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.516.533.304	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.701.184.504	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55.925.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.343.855.814	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.301.403.690	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	815.348.800	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	815.348.800	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	157.315.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	157.315.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	157.315.000	
7.01.7.01.7.01.01.0000	Kecamatan Palu Utara	11.480.555.002	
7.01.7.01.7.01.01.0000	Kecamatan Palu Utara	11.480.555.002	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.763.201.762	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.202.900	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.465.400	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.653.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.653.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.431.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.266.826.452	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.264.700.452	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.126.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	514.470.410	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.529.100	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	268.211.310	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.876.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.750.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.104.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.000.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	26.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.452.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.880.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.572.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.250.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	309.500.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.600.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.150.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.181.800	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.181.800	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.181.800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.545.856.440	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.962.161.940	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36.032.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.217.654.910	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.708.474.530	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	583.694.500	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	583.694.500	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	162.315.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	162.315.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	162.315.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.918.847.724	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.918.847.724	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.918.847.724	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.587.205.459	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.357.050	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.154.900	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.897.900	
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.995.400	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.852.200	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.456.650	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.430.770.609	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.428.063.309	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.537.350	
8.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.169.950	
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.435.800	
8.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	906.150	
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.529.650	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.468.850	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.200.000	
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.196.150	
8.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	23.072.700	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	289.642.050	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.836.300	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.911.400	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.015.150	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.409.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.870.000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.353.500	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	14.562.500	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.791.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.182.600	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.748.800	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	408.433.800	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.995.000	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.170.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.825.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.208.113.625	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.208.113.625	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.284.730.825	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.616.980.100	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	306.402.700	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.343.601.140	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.343.601.140	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.524.989.650	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	786.796.690	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	31.814.800	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	28.587.400	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.587.400	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.632.950	
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.625.950	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6.328.500	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.281.572.950	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.281.572.950	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.152.454.050	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	108.996.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20.122.900	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	469.767.150	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	469.767.150	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	79.896.900	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	178.866.050	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	211.004.200	

4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2023 untuk total belanja sebesar Rp.1.325.339.161.009,- yang diperuntukkan bagi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Klasifikasi belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Plafon Anggaran Sementara untuk belanja secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	613.340.840.639
2	Belanja Barang dan Jasa	479.579.603.984
3	Belanja Hibah	13.554.545.156
4	Belanja Bantuan Sosial	6.040.000.000
5	Belanja Modal	203.824.171.230
	a. Belanja Modal Tanah	1.000.000.000
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.740.910.510
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.451.041.686
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	132.462.219.034
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	155.000.000
	f. Belanja Aset Lainnya;	15.000.000
6	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000
	TOTAL	1.325.339.161.009

V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana anggaran pada komponen Pembiayaan Daerah, baik dari sisi penerimaan pembiayaan maupun dari sisi pengeluaran pembiayaan, dalam PPAS Tahun 2023 belum dapat diperhitungkan dengan seksama, serta adanya beberapa kebijakan keuangan daerah yang masih dalam tahap pembahasan, dan selanjutnya akan disampaikan pada RAPBD tahun rencana.

Mengingat kalkulasi sisa lebih anggaran pada tahun berkenaan masih berjalan, demikian halnya dengan pos penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Kota Palu dalam PPAS Tahun 2023 disajikan seperti Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.767.604.000
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.767.604.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	39.767.604.000
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000
	Pembiayaan Netto	31.767.604.000

VI. PENUTUP

Dengan memperhatikan usulan dan masukan dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu serta mencermati hal-hal yang timbul kemudian setelah nota kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini ditandatangani, akan menjadi masukan untuk melakukan rasionalisasi dan penyesuaian dalam penetapan pagu definitif baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan, yang selanjutnya disusun ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2023.